

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Realitas Patriarkhi dalam Pesantren di Kabupaten Kediri

Pondok pesantren di Kabupaten Kediri senantiasa melestarikan sistem kepemimpinan patriarkhis dalam menjalankan operasional lembaganya, seluruh posisi tertinggi kepemimpinan lembaga diduduki penuh oleh kalangan laki-laki (kiai) dan tidak memberi ruang bagi kalangan perempuan dalam mengisi posisi kepemimpinan. Dalam musyawarah ataupun pengambilan kebijakan pesantren, keberadaan nyai juga tidak terlalu diperhitungkan, sehingga keadaan tersebut menempatkan kalangan perempuan pesantren pada posisi yang ter subordinasi.

Dalam pandangan mayoritas kiai pesantren di Kabupaten Kediri, superioritas laki-laki merupakan keputusan agama yang tidak bisa diganggu gugat, mereka membenarkan bahwa kualitas laki-laki jauh di atas perempuan dan laki-laki memiliki jangkauan yang lebih luas dari pada perempuan. Bahkan ada yang berpandangan bahwa selamanya kalangan perempuan pesantren tidak akan pernah bisa melampaui superioritas kaum laki-laki pesantren

Keterikatan pondok pesantren di Kabupaten Kediri pada kitab kuning yang kaya akan nuansa patriarkhi pada gilirannya juga menjelma menjadi suatu tradisi yang kaku. Jika kiai mendapatkan nilai lebih dari hasil kajian tersebut, sedangkan nyai dan santri putri dipastikan mendapatkan implikasi negatif dari konstruksi pemahaman mereka akan hak dan kewajiban seorang wanita dan posisinya di antara laki-laki.

Mayoritas pengasuh pesantren di Kabupaten Kediri sebagai pemegang kendali otoritas pesantren cenderung memilih tertutup dan mengamini karya-karya yang banyak mengandung unsur misiojinistik tersebut daripada mengadakan kajian secara mendalam baik secara filosofis, teologis maupun historis. Bahkan tidak jarang di antara pengasuh yang mengharamkan untuk berfikir *kritis-transformatif* terutama bagi komunitas pesantren, karena hal tersebut dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak tatanan keislaman yang telah mapan.

## 2. Respon Bu Nyai atas Dominasi Kiai dalam Kepemimpinan Pesantren di Kabupaten Kediri

Dominasi laki-laki secara berlebihan dalam pesantren yang hampir tidak memberikan kesempatan serta peluang bagi kalangan perempuan menimbulkan kekuatan tersendiri bagi kelas yang ter subordinasi (nyai), karena menurut Gramsci dominasi harus melalui konsensus yang disepakati oleh seluruh kelas baik yang memimpin atau yang dipimpin. Namun sistem dominasi laki-laki dalam pesantren hingga saat belum

mampu merefleksikan bentuk kepemimpinan yang disepakati oleh dua kelas berbeda (kiai dan nyai).

Ketimpangan gender yang terjadi dalam pesantren tersebut pada akhirnya memunculkan apa yang disebut oleh Gramsci sebagai intelektual organik, yaitu mereka yang mampu merasakan emosi, dan semangat yang dirasakan kaum tertindas, memihak dan mengungkapkan apa yang dialami mereka dalam bentuk gerakan resistensi. Dalam konteks ini intelektual organik tersebut adalah para bu nyai yang memiliki kemampuan serta keberanian dalam berkata dan bertindak dalam upaya melawan ketidakadilan gender yang sedang berlangsung di pesantren.

Dari penelitian ini ditemukan 2 (dua) jenis tipologi resistensi yang dilakukan oleh bu nyai pondok pesantren di Kabupaten Kediri sebagai bentuk perlawanan atas dominasi kiai dalam kepemimpinan pesantren:

a. Tipologi Idealis -Dialogis

Jenis resistensi idealis -dialogis ini adalah resistensi sederhana yang mengupayakan adanya keterbukaan dan kesadaran antara laki-laki (kiai) dan perempuan (nyai) dalam konsep kepemimpinan yang ideal dan berasaskan keadilan. Jenis resistensi dialogis nampak dari gerakan yang dilakukan oleh nyai pondok pesantren Darussalam Sumbersari dan Pondok pesantren al-Ishlah Bandar Kediri.

Dalam upaya menegakkan keadilan gender dalam pesantren, dua pondok tersebut tidak harus menunjukkan gerakan-gerakan

perlawanan yang bersifat aksi nyata, akan tetapi lebih mengutamakan adanya pemahaman-pemahaman gender melalui kegiatan pembelajaran dan diskusi.

Dalam konteks tersebut di atas, proses pembelajaran di pesantren yang sebelumnya mayoritas di bawah kendali aktor laki-laki seperti kiai dan ustadz, sekarang sudah mulai terbuka dan memberikan banyak ruang terhadap kalangan perempuan pesantren untuk dapat mengaktualisasikan keilmuannya. Hal tersebut ditandai dengan keikutsertaan nyai dan ustazah dalam proses belajar mengajar dengan menempatkan mereka sebagai pembaca atau pengajar kitab-kitab di pesantren. Bahkan kitab yang dianggap sangat sensitif bias gender seperti *uqūd al-Lijjalīyn* sudah mulai dibaca oleh mereka di depan santri laki-laki dan perempuan.

Progresifitas yang demikian memberikan potensi yang besar terhadap terciptanya keadilan gender di dalam pesantren secara ideal.

#### b. Tipologi Idealis-Praktis

Berlainan dengan tipologi idealis-praktis, tipologi idealis-praktis tidak hanya melakukan dialog atau wacana dalam gerakannya, namun lebih menekankan adanya gerakan-gerakan perlawanan yang bersifat aksi nyata sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Tipologi resistensi idealis-praktis ingin menunjukkan bahwa perempuan pesantren (nyai) juga tidak kalah dari laki-laki (nyai) dalam berbagai hal termasuk dalam memimpin

dan mengelola pesantren. Tidak hanya itu, gerakan resistensi idealis-praktis juga memperlihatkan betapa perempuan pesantren (nyai) sebenarnya juga mempunyai kemampuan intelektual dan spiritual yang tinggi bahkan bisa melampaui ekspektasi yang dimiliki oleh kiai. Gerakan resistensi idealis-praktis ini nampak pada gerakan yang dilakukan oleh nyai pondok pesantren ar-Risalah Lirboyo dan pondok pesantren al-Hikmah.

Gerakan resistensi dalam kategori tersebut sebenarnya tidak menolak secara general terhadap kepemimpinan laki-laki atas perempuan pesantren, namun hanya sebagai usaha pembuktian dan penegakan hak perempuan yang telah terdistorsi oleh pakem pesantren. Artinya, bagi mereka kepemimpinan tidak harus di bawah kendali laki-laki, namun siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kualitas serta kapabelitas untuk menjadi pemimpin maka berhak untuk mendapatkannya. Bukan hanya itu, mereka juga sebenarnya ingin menjawab berbagai macam tuduhan terhadap perempuan yang dianggap *second class* atas laki-laki dalam berbagai hal. Bagi mereka, tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal kecuali hanya kodrat fisik dan status keluarga.

## **B. Implikasi Teoritik**

Penelitian kepemimpinan pada pesantren ini merupakan penguatan dari beberapa pendapat para pemikir gender yang menganggap bahwa tidak

adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akibat dari kekeliruan mendasar dalam memahami al-Qur'an, sebagaimana penafsiran oleh para ulama' salaf yang karya misioginisnya dilestarikan sampai sekarang khususnya oleh para kalangan pesantren.

Aminah Wadud Muhsin menjelaskan bahwa kekeliruan penafsiran terhadap ayat-ayat al- Qur'an tentang wanita lantaran ditafsirkan oleh kaum pria, bukan ditafsirkan oleh kaum wanita itu sendiri. Akibatnya, penafsiran yang dibuat hanya berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pikiran kaum pria saja. Akibat lebih lanjutnya adalah terjadinya kekeliruan penafsiran yang menyebabkan wanita dalam posisi lemah, rendah, serta kurang dalam berbagai bidang dibanding kaum laki-laki<sup>1</sup>. Tidak jauh berbeda yang terjadi di pesantren, bahwa pemahaman kepemimpinan patriarkhis juga diakibatkan oleh pemahaman individu dalam mentafsirkan sebuah teks.

Pendapat Zamakhsyari Dhofir yang mensinyalir bahwa kebanyakan Kiai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan kerajaan kecil dimana Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren<sup>2</sup>. Pendapat tersebut telah diyakini kuat oleh mayoritas kalangan pesantren.

Kedua pendapat tersebut di atas yang muncul dari tokoh feminisme dan pemerhati pesantren sudah menjadi paradigma tersendiri dari para kalangan pesantren dalam waktu yang cukup lama sehingga dengan sendirinya telah menjadi budaya yang baku.

---

<sup>1</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, "terj." Yasir Rodiah (Yaziar Radianti; Bandung Pustaka, 1994). 125-127.

<sup>2</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 74.

Namun dewasa ini, munculnya beberapa nyai dari kalangan perempuan pesantren yang sudah berani melakukan sebuah resistensi atas hegemoni kepemimpinan pesantren yang bersifat patriarkhis sedikit banyak telah meruntuhkan pendapat-pendapat di atas. Resistensi yang dilakukan oleh beberapa nyai dari pondok pesantren di Kediri telah menjadi titik klimaks dari frustrasi akibat keterbatasan mereka untuk mengaktualisasikan diri dalam mengembangkan bakat dan potensi perempuan dalam segala bidang.

Jika resistensi yang dilakukan oleh nyai merupakan sebuah penolakan terhadap pendapat-pendapat kepemimpinan dalam pesantren yang sudah mapan, maka resistensi yang dilakukan oleh nyai dalam konteks memperjuangkan keadilan gender dalam pesantren juga merupakan hasil temuan yang sesuai dengan teori gramsci, bahwa hegemoni yang tidak berasaskan keadilan dan konsensus kelas, maka menimbulkan sebuah counter hegemoni, yakni perlawanan dari pihak yang ter subordinasi, dalam konteks kepemimpinan pesantren adalah bu nyai.

Dengan demikian, dalam usaha mengupayakan kesetaraan gender yang bernuansa keadilan khususnya di lingkungan pesantren salaf tidak tepat lagi apabila hanya mengkritisi kitab kuning, dan merekonstruksi kurikulum pembelajaran yang terdapat di pesantren, melainkan perlu adanya usaha lain yang lebih dari semua itu, termasuk mengadakan penyuluhan pendidikan kepemimpinan bagi putra-putra kiai yang nantinya akan melanjutkan roda kepemimpinan pesantren tersebut, juga adanya dialog yang lebih terbuka antara beberapa pihak yang terkait khususnya kiai dan nyai, sehingga konsep

kepemimpinan pesantren bisa diterima oleh kedua pihak. Diharapkan pada periode berikutnya pesantren yang selama ini adalah salah satu pusat pembelajaran dan penyebaran patriarkhi bisa berubah menjadi pusat pendidikan yang berkeadilan dan bijaksana.

### **C. Rekomendasi**

Dalam rangka untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya, maka lembaga seperti pesantren mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mensosialisasikan ajarannya. Dengan potensi besar yang dimiliki lembaga ini, pesantren seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperdayakan kaum perempuan secara optimal. Stereotipe negatif yang selama ini dianggap lahir dari bias penafsiran teks keagamaan dapat dirubah oleh kalangan pesantren dengan melakukan dakwah yang berkesetaraan dan berkeadilan. Apalagi, di daerah Jawa “kepercayaan” masyarakat kepada para Kiai dan ulama’ sangatlah besar. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi motor penggerak terciptanya masyarakat yang berbudaya berdasarkan asas persamaan dan keadilan.

Berangkat dari keterangan di atas maka peneliti merekomendasikan beberapa poin sebagaimana berikut:

1. Para Kiai hendaknya lebih terbuka dalam menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang telah menadakan kajian mendalam terhadap pesantren dan realitas di dalamnya, terutama dalam masalah praktik kepemimpinan patriarkhi dalam pesantren yang sebenarnya tidak sesuai



dengan ruh ajaran Islam. Karena dengan sikap terbuka tersebut diharapkan mampu menjembatani adanya jalur dialog yang sehat antara Kiai dan para pemerhati pesantren. Sebaliknya, jika Kiai selalu tertutup dan apatis terhadap kritik dan saran bahkan terlebih dahulu “mengecap” sesat kepada kajian-kajian ilmiah yang secara langsung atau tidak langsung mengkritiknya sebelum menelaah lebih dalam, maka dapat dipastikan selamanya kajian-kajian tersebut hanya menjadi tulisan hampa.

2. Para aktor pengendali pesantren juga harus meredesain kurikulum pembelajarannya dengan tidak hanya menggunakan kitab kuning yang bersifat *normatif*, *ritualistik* dan *eskatologis* saja, namun juga harus mulai mengenalkan pemahaman-pemahaman yang bersifat filosofis, antropologis, sosiologis, dan landasan ilmu-ilmu modern lainnya. Dengan demikian diharapkan pemahan para santri tidak cenderung konservatif dalam melihat, menela'ah dan menafsiri sebuah realitas patriarkhi yang terjadi.
3. Sebagai *agent of culture* dan *agent of change* Para Kiai hendaknya berani mensosialisasikan upaya keadilan gender dan menghapus tradisi patriarkhi yang selama ini tumbuh subur di lingkungan masyarakat. Melalui dakwah, pengajian dan khutbah Kiai harus merubah maenseatnya yang dulunya memarjinalkan perempuan, sekarang harus mengangkat derajat perempuan sama dengan derajat laki-laki.

Dari rekomendasi tersebut jika para aktor pesantren mampu untuk merealisasikannya dengan hati lapang dan sebenarnya maka dapat dipastikan keberadaan atau posisi perempuan di pesantren khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya akan memiliki harapan dalam mengaktualisasikan dirinya seperti laki-laki. Dengan demikian sedikit banyak akan memberikan peluang terhadap terciptanya sebuah keadilan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia ini.